



**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, 6 Februari 2025
Kepala Dinas,

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 - 2024. Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) visi, 1 (satu) misi, 3 (tiga) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja tahun pertama Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar **102,40%**. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. **9.379.573.220,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 adalah sebesar Rp. **8.694.762.528,-** atau **92,70%**.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 sasaran yang mencakup 6 indikator sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2024 mencapai 102,40% atau bermakna sangat tinggi**. Dengan uraian : 6 sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2024,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparatur Pemerintah	5
D. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	10
A. Visi Kota Tarakan 2019-2024	11
B. Misi Kota Tarakan 2019-2024	12
C. Tujuan dan Pembangunan Daerah	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
E. Indikator Kinerja Utama	26
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran Kinerja	30
B. Analisis Pengukuran Kinerja	31
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	60
D. Analisis Penggunaan Sumber Daya	70
E. Penghargaan Yang Diterima	71
BAB IV	
KESIMPULAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Tindak lanjut rekomendasi	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2019-2024; (2) rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2023, dan (3) Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Kota Tarakan Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tarakan No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Kota Tarakan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Kota Tarakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

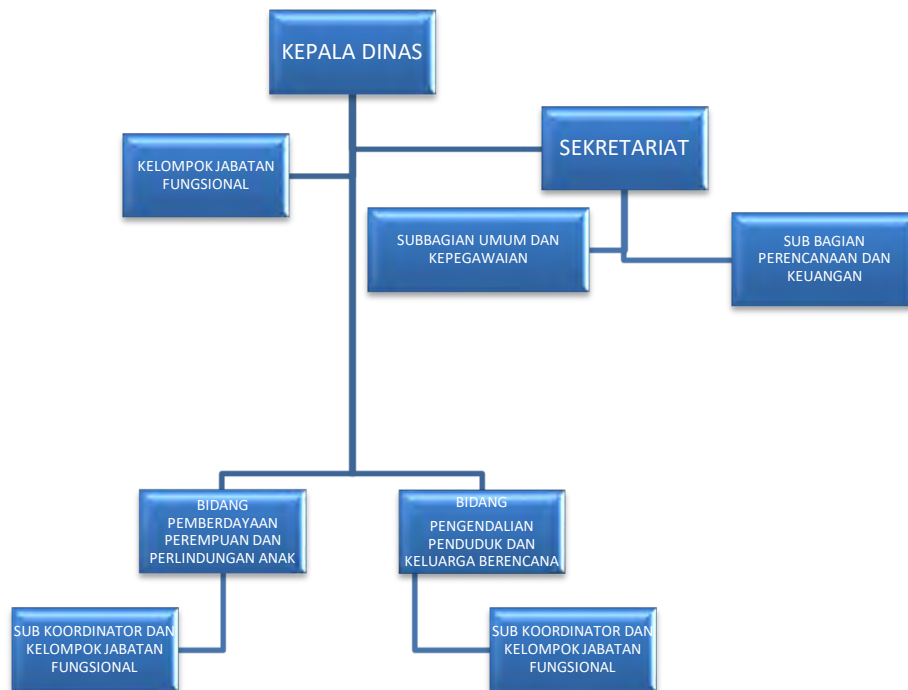


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 2. Pelaksana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 2. Pelaksana



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DP3APPKB Kota Tarakan





C. Aparatur Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengampu urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Aparatur Pemerintah yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



**DATA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN	JUMLAH NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
						SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	SEKRETARIAT	8	0	3	5	0	0	0	0	7	1	0
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	0	2	4	0	0	1	1	3	1	0
3	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	0	3	2	0	0	1	0	4	0	0
4	PKB	17	0	7	10	0	2	5	0	9	1	0
5	Petugas Khusus P2TP2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6	Cleaning Service	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
7	Penjaga Malam	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0
8	Kelompok Jabatan Fungsional	4	0	1	3	0	0	0	0	3	1	0
	TOTAL	40	4	19	25	1	3	7	1	27	5	0

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Desember Tahun 2024



D. ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, yaitu permasalahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pada tataran kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terciptanya kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Masih tingginya tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
3. Belum maksimalnya pelayanan Keluarga Berencana kepada seluruh lapisan masyarakat
4. Data pilah responsif gender belum tersedia dengan baik.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
3. Tingginya angka *unmet need*. *Unmet need* adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Tingginya angka *unmet need* di Indonesia berpotensi terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan



Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, sebagai berikut

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, persentase perempuan di lembaga legislatif; partisipasi angkatan kerja perempuan.
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
3. Tingginya angka *unmet need*, masih tingginya kasus pernikahan usia muda, rendahnya tingkat ekonomi, besarnya jumlah tanggungan dalam keluarga, rendahnya akses informasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, faktor internal yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan antara lain:

1. Merupakan Dinas teknis yang memiliki kewenangan penuh pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Jumlah personil dan armada yang mampu menunjang tupoksi Dinas.
3. Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
4. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparatur pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
5. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
6. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Terdapat organisasi masyarakat yang bisa diajak bekerja sama dalam menangani tupoksi.
2. Dukungan dana DAK dari Pemerintah pusat juga dana perbantuan dari kementerian terkait.
3. Kurangnya koordinasi lintas OPD serta lintas sektor

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.
2. Belum optimalnya pencegahan KDRT sehingga masih terjadi kasus KDRT.
3. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB.
4. Belum optimalnya data keluarga yang akurat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota No 31 Tahun 2009 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan telah melalui tahapan yang stimulaan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Antar OPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan 2019-2024

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah: **“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City”**

Pernyataan Visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju yang mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik di semua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera yang mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketentraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita- cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan



menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City yang Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian **smart city** secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota yaitu fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan **smart** bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama **smart city (Boyd Cohen)** menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain **Smart Living** atau hidup yang cerdas, **Smart Governance** atau Pemerintahan yang cerdas, **Smart Economy** atau Ekonomi cerdas, **Smart Mobility** atau Mobilitas cerdas, **Smart Environment** atau Lingkungan cerdas, dan **Smart People** atau Masyarakat cerdas.

B. Misi Kota Tarakan 2019-2024

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi pertama. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan optimalnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang menangani kesetaraan gender, dan meningkatnya optimalisasi pelaksanaan KB dan KS.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- Sasaran 1. Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga.
- Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak

2. Tujuan 2: Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Sasaran dari tujuan tersebut yaitu:

- Sasaran 1. Meningkatnya Akseptor KB.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintah

Sasaran dari tujuan tersebut yaitu :

- Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target Akhir	
1.	Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.													
1	Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	1	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	1	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	indeks	92,16	92,00	92,10	92,29	92,30	92,30	92,30
				2	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	indeks	59,34	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	60,33	
			2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	persentase	0	18,98	18,72	18,50	17,20	17,95	17,95



				perlindungan khusus terhadap anak	4	Rasio Kekerasan terhadap Anak	persentase	0	18,98	18,72	18,50	17,20	17,95	17,95
2.	Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing													
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	3	Meningkatnya AKseptor KB	3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	persentase	0	63,13%	63,15%	64,15%	65,15%	66,15%	66,15%
3.	Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.													
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Nilai/Predikat LAKIP	4	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	4	Nilai/Predikat LAKIP	Skor	61,12 /BB	65,28 /BB	68,00 /BB	70,00 /BB	71,00 /BB	72,00 /BB	72,00 /BB



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	1. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,30
		2. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	60,33
2.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	17,95%
		4. Rasio Kekerasan terhadap Anak	17,95%
3.	Meningkatnya akseptor KB	5. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	65,15%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Nilai/Predikat LAKIP	72,00 /BB

Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 10 (sepuluh) Program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.379.573.220,-

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024		BAGIAN/ BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i>	<i>1 lembaga</i>	<i>1.3842.640,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPR	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	13.842.640,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	250.000.000,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	<i>20 kegiatan</i>	<i>68.585.130,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	68.585.130,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus yang mendapat pelayanan</i>	<i>20 kegiatan</i>	<i>195.951.360,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>



	- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 orang	15.369.500,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 layanan	180.581.860,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi</i>	<i>8 lembaga</i>	<i>18.851.700,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	25 orang	18.851.700,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak



	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak</i>	100 keluarga	23.346.570,00	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 dokumen	13.946.700,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	9.399.870,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	2 organisasi	12.362.920,00	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i>	<i>1 layanan</i>	<i>9.939.800,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 layanan	9.939.800,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	5.451.960,00	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
	- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	1 gugus tugas	93.364.680,00	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>



- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 organisasi	55.659.360,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	37.705.320,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i>	<i>4 lembaga</i>	<i>171.886.420,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		150.000.000,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.886.420,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	7 kegiatan	67.034.730,00	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
- Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 OPD	67.034.730,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus anak</i>	20 kasus	<i>277.652.727,00</i>	<i>Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20 orang	22.635.197,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak



	- Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 layanan	255.017.530,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	89.412.360,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	- Peningkatan Kapasitas SDM lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	69.020.000,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	- Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkebutuhan khusus, anak mengalami bencana)	20 orang	20.392.360,00	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya Akseptor KB				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen data keluarga</i>	1 dokumen	435.027.440,00	<i>Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>
	- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	187.228.800,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	179.121.840,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	44.676.800,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	24.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				
	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	4 layanan	778.298.800,00	<i>Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>
	- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 organisasi	200.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	114.770.800,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	2.800.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	65.380.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	255.348.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil	1 laporan	140.000.000,00	Bidang Pengendalian



		Pengendalian Program KKBPK			Penduduk dan Keluarga Berencana
	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i>	17 orang	60.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	60.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan KB</i>	3 layanan	1.940.103.450,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	29.700.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	144 orang	476.830.850,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1.409.672.600,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	23.900.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</i>	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dalam pengelolaan program KKBPK</i>	80 mitra kerja	46.750.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	3.750.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	4 Kampung KB	43.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	3 kegiatan	185.851.450,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan	27 kelompok	10.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan



	Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk			Keluarga Berencana
	- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	129.999.050,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang	35.852.400,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>677.100.000,00</i>	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	261.000.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	416.100.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL Anggaran				Rp. 3.750.396.352,00	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		BAGIAN/ BIDANG
			KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>4 layanan</i>	<i>3.716.214.978,00</i>	<i>Sekretariat</i>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	3.657.288.978,00	Sekretariat
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	58.926.000,00	Sekretariat
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</i>	<i>3 layanan</i>	<i>79.386.900,00</i>	<i>Sekretariat</i>
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060,00	Sekretariat



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.979.840,00	Sekretariat
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	49.411.000,00	Sekretariat
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang diadakan</i>	<i>8 unit</i>	<i>44.277.850,00</i>	<i>Sekretariat</i>
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	44.277.850,00	Sekretariat
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	<i>2 Layanan</i>	<i>73.516.021,00</i>	<i>Sekretariat</i>
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000,00	Sekretariat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021,00	Sekretariat
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i>	<i>33 Unit</i>	<i>45.636.334,00</i>	<i>Sekretariat</i>
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2.709.000,00	Sekretariat
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334,00	Sekretariat
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Jenis	9.870.000,00	Sekretariat
TOTAL Anggaran Pendukung			Rp. 3.958.759.083,00	

E. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024, terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.





Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Perubahan Rencana Strategis 2019-2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1. Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	1	IPG	$= 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc - Dist]$ Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	Indeks	92,29	Data Kementerian PPPA	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	IDG	$= 1/3 (Ipar + IDM + Linc - Dist)$ Ipar= indeks keterwakilan di parlemen IDM= indeks pengambilan keputusan Linc-dist = indeks distribusi pendapatan	Indeks	60,13	Data Kementerian PPPA	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	$\left(\frac{\sum \text{kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\sum \text{perempuan diatas usia 18 tahun}} \right) \times 100.000$	Persentase	17,15	Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4	Rasio Kekerasan terhadap Anak	$\frac{\sum \text{kasus kekerasan terhadap anak}}{\sum \text{anak dibawah usia 18 tahun}} \times 10.000$	Persentase	17,15	Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatnya Akseptor KB	5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	$\left(\frac{\sum \text{perempuan usia reproduksi (usia 15 - 49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi}}{\sum \text{seluruh perempuan usia 15 - 49 tahun}} \right) \times 100$	Persentase	65,15	Data SIGA Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan di atas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah/Wali Kota.

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Bab ini akan disajikan uraian



pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu,. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	SS1: Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	<u>IKU1:</u> IPG	92,30	92,73*	100.47
		<u>IKU2:</u> IDG	60,33	58,61*	97.15



2.	SS2: Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	IKU3: Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	17,95	17,41	130,10
		IKU4: Rasio Kekerasan terhadap Anak	17,95	2,56	701,17
3.	SS3: Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga	IKU5: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	65,15	70,215	106,15
4.	SS4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IKU6: Nilai SAKIP	72,00	70,30*	97,64
CAPAIAN KINERJA					665,67

Sumber : Data DPPAPPKB, 2024; * data tahun 2024

Pencapaian kinerja 4 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2023

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	6
2	76 s/d <90	Tinggi	
3	66 s/d <75	Sedang	
4	51 s/d <65	Rendah	
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	
Total Sasaran			6

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan



Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga
Indikator 1 : IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Capaian IPG Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 91,63, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Namun begitu, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu pembangunan laki-laki masuk dalam kategori “tinggi” karena pencapaiannya sudah melebihi 70 sedangkan pembangunan perempuan masih masuk kategori “sedang” karena pencapaiannya belum mencapai 70.

Untuk menghitung nilai Indeks Pembangunan Gender di tahun 2023, menggunakan rumus:

$$= 1/3 [X_{\text{de}}(1) + X_{\text{de}}(2) + \text{Linc} - \text{Dist}]$$

Dimana:

X_{de}(1) = X_{de} untuk harapan hidup

X_{de}(2) = X_{de} untuk pendidikan

Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan

Penghitungan IPG ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sehingga menggunakan nilai IPG yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks ini biasanya dipublikasikan pada bulan April pada tahun sesudahnya. Jadi kami menggunakan data IPG tahun 2023, karena publikasi IPG tahun 2024 belum rilis hingga saat laporan ini disusun.



Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tarakan pada tahun tahun 2020 hingga tahun 2024:

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Keempat(2024)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2024 Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d thn 2024 thd target RENSTRA (%)
						Target	Realisasi			
<u>IKU1:</u> IPG (Indeks Pembangunan Gender)	indeks	92,16	91,90	92,00	92,06	92,30	92,73	100,47	92,30	100,47

Sumber : Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Capaian kinerja pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 92,30 dan target kinerja tersebut telah tercapai 92,73 sehingga persentase capaian terhadap target pada tahun ketiga Renstra adalah 100,47%. Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 100,47% dengan kategori **sangat tinggi**.

Berikut ini data pencapaian Indeks Pembangunan Gender menurut Nasional dan Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2019 hingga 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik:

Tabel.3.4:

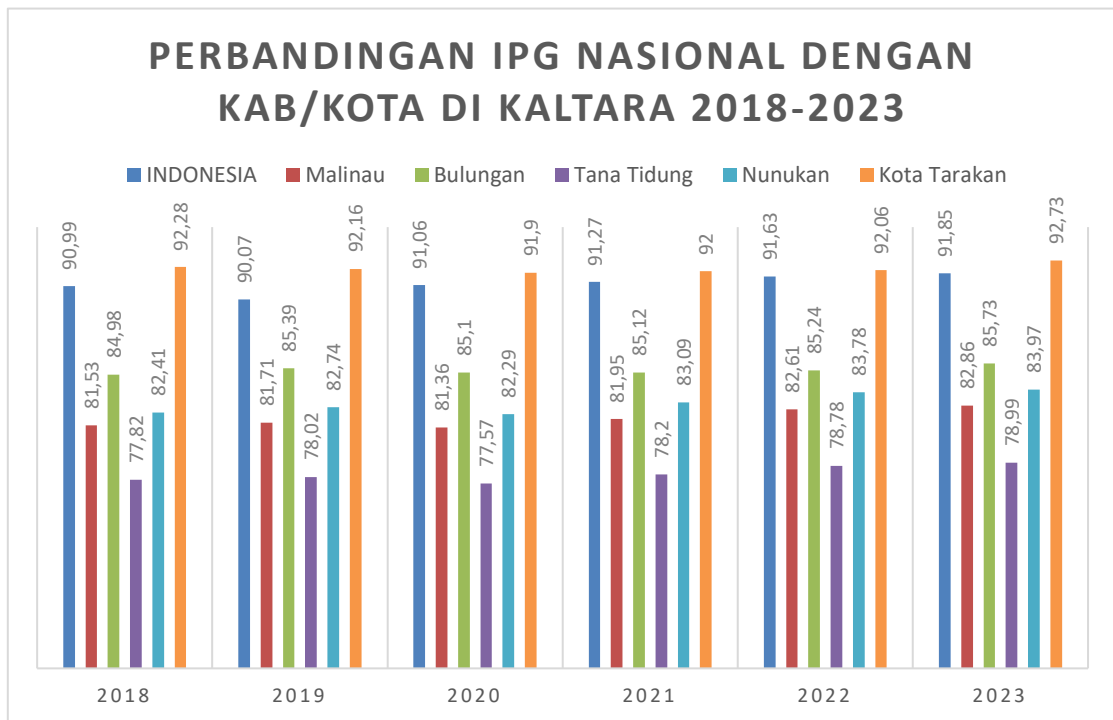
Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Nasional dan Kabupaten/Kota, 2019-2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	IPG					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INDONESIA	90,99	90,07	91,06	91,27	91,63	91,85
Malinau	81,53	81,71	81,36	81,95	82,61	82,86
Bulungan	84,98	85,39	85,10	85,12	85,24	85,73
Tana Tidung	77,82	78,02	77,57	78,20	78,78	78,99
Nunukan	82,41	82,74	82,29	83,09	83,78	83,97
Kota Tarakan	92,28	92,16	91,90	92,00	92,06	92,73

Sumber: Data BPS 2024



Grafik 3.1:
PERBANDINGAN IPG NASIONAL DENGAN KAB/KOTA DI KALTARA 2018-2023



Sumber: Data BPS 2024

Tabel.3.5:
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Nasional dan Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Kota Tarakan Tahun 2024	Keterangan
<u>IKU1</u> : IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	91,85	92,73	diatas capaian nasional

Sumber: Data BPS 2024



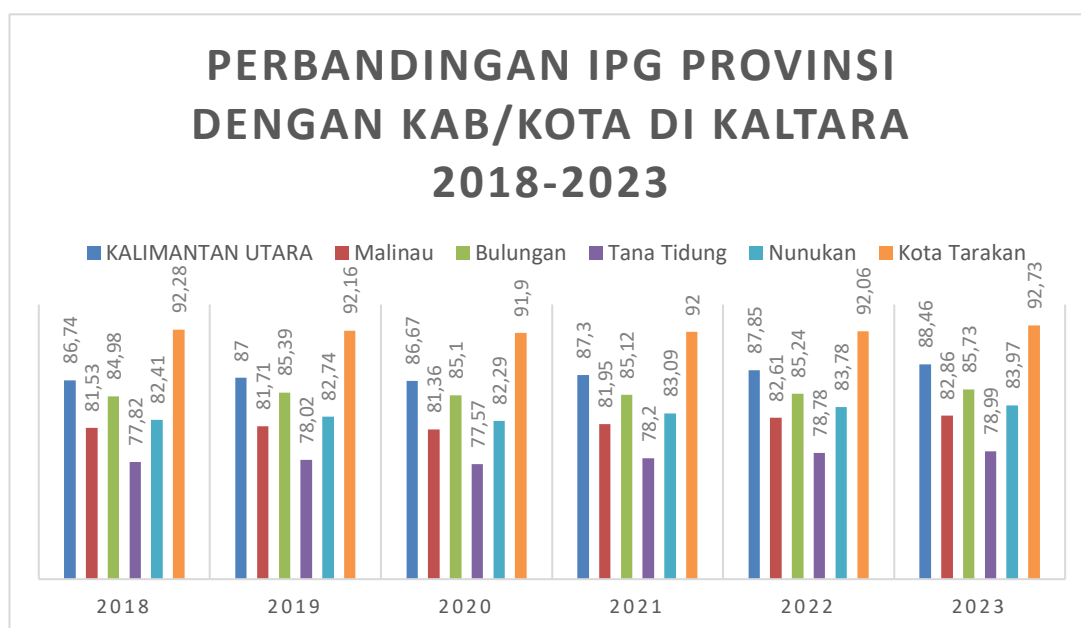
Sedangkan data pencapaian Indeks Pembangunan Gender menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2018 hingga 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik:

Tabel.3.6:
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018-2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	IPG					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN UTARA	86,74	87,00	86,67	87,30	87,85	88,46
Malinau	81,53	81,71	81,36	81,95	82,61	82,86
Bulungan	84,98	85,39	85,10	85,12	85,24	85,73
Tana Tidung	77,82	78,02	77,57	78,20	78,78	78,99
Nunukan	82,41	82,74	82,29	83,09	83,78	83,97
Kota Tarakan	92,28	92,16	91,90	92,00	92,06	92,73

Sumber: Data BPS 2024

Grafik 3.2:
PERBANDINGAN IPG PROVINSI DENGAN KAB/KOTA DI KALTARA 2018-2023



Sumber: Data BPS 2024



Berikut ini pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tarakan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 pada tahun 2018 sebesar 91,28; pada tahun 2019 sebesar 92,16; pada tahun 2020 sebesar 91,90; pada tahun 2022 sebesar 91,90; pada tahun 2022 sebesar 92,06; dan pada tahun 2023 sebesar 92,73. Terjadi penurunan IPG pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Indeks Pembangunan Gender (IPG) capaian Kota Tarakan di atas capaian rata-rata Kabupaten lain dan Provinsi.

Pada tabel dibawah ini menggambarkan analisa efisiensi berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran yang digunakan pada tahun anggaran 2024:

Tabel.3.7:
Analisa Efisiensi berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja		Keuangan				Ket
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	
IKU1: IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,30	92,73	100.47	13.842.640	13.053.800	94,30	Efisien

Tabel.3.8:
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Dukungan Personil dalam Pencapaian Sasaran	
				PNS	Non PNS
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,47	3	0



Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah:

1. Pembinaan pada organisasi perempuan yang ada di kota Tarakan.
2. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan:

1. Pendampingan organisasi wanita yang ada di Tarakan untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan, pemahaman serta kepedulian atas masalah kesejahteraan perempuan dan anak.
2. Bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan penyuluhan tentang pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.
3. Pelatihan teknis perencanaan bisnis dalam usaha mikro bagi perempuan serta pelatihan pengelolaan manajemen dan keuangan usaha bagi Perempuan

Tercapainya target indikator sasaran strategis DP3APPKB Kota Tarakan tidak terlepas dari indikator sasaran program yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam tercapainya target indikator sasaran strategis tersebut.

Faktor pendukung tersebut di antaranya, yaitu (1) Ketersediaan serta kemudahan bagi perempuan dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. (2) Kemudahan bagi perempuan mendapatkan akses



pendidikan dan pekerjaan di Kota Tarakan. (3) Rendahnya angka putus sekolah bagi anak perempuan di Kota Tarakan (4) Banyaknya kegiatan pendampingan dan peningkatan kompetensi pada UMKM yang sebagian besar pelakunya adalah Perempuan

Faktor penghambat tersebut di antaranya, yaitu (1) angka kesakitan dan mengalami keluhan kesehatan pada kelompok penduduk perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok penduduk laki-laki. (2) Ketimpangan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan. (3) Ketimpangan kompetensi perempuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak salah satu jenis kelamin sehingga memberikan peluang yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga
Indikator 2 : IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 76,90 (BPS).

Untuk menghitung nilai Indeks Pembangunan Gender di tahun 2022, menggunakan rumus:

$$= 1/3 (Ipar + IDM + Lin - Dist)$$



Dimana:

Ipar = indeks keterwakilan di parlemen

IDM = indeks pengambilan keputusan

Linc = indeks distribusi pendapatan

Penghitungan IDG ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sehingga menggunakan acuan nilai IDG yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks ini biasanya dipublikasikan pada bulan April pada tahun sesudahnya. Jadi kami menggunakan data IDG tahun 2023, karena publikasi IPG tahun 2024 belum rilis hingga saat laporan ini disusun.

Berikut ini pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tarakan tahun 2024 yaitu sebesar 58,61

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian s/d thn 2024 thd target RENSTRA (%)
						Target	Realisasi			
<u>IKU2 :</u> IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	indeks	59,34	59,72	58,92	59,15	60,33	58,61	97,15	60,33	97,15

Sumber : Data BPS, 2024

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 97,15% dengan kategori **sangat tinggi**, dimana capaian kinerja tahun 2024 yang merupakan tahun keempat dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Berikut ini data pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender menurut Nasional dan Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik:

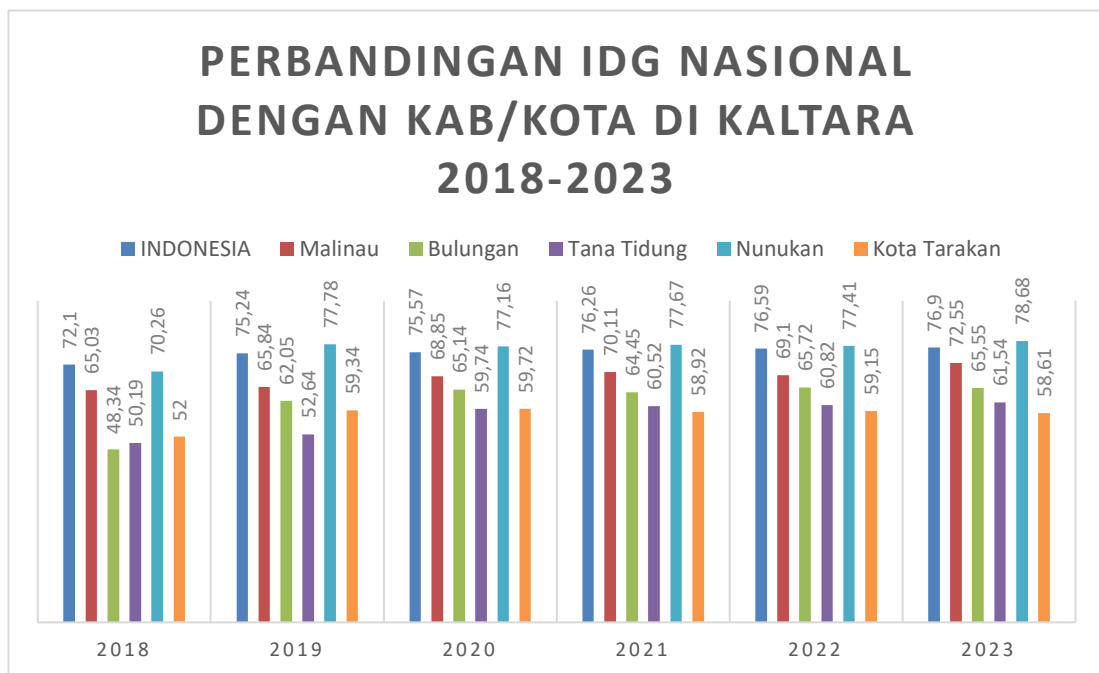
Tabel 3.11

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Nasional dan Kabupaten/Kota, 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	IDG					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INDONESIA	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90
Malinau	65,03	65,84	68,85	70,11	69,10	72,55
Bulungan	48,34	62,05	65,14	64,45	65,72	65,55
Tana Tidung	50,19	52,64	59,74	60,52	60,82	61,54
Nunukan	70,26	77,78	77,16	77,67	77,41	78,68
Kota Tarakan	52,00	59,34	59,72	58,92	59,15	58,61

Sumber: BPS, 2024

Grafik 3.3:
PERBANDINGAN IDG NASIONAL DENGAN KAB/KOTA DI KALTARA 2018-2023



Sumber: BPS, 2024



Tabel.3.12:
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Nasional dan Kota Tarakan
Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Kota Tarakan Tahun 2024	Keterangan
<u>IKU2</u> : IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	76,90	58,61	dibawah capaian nasional

Sumber: Data BPS 2024

Berikut ini data pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik:

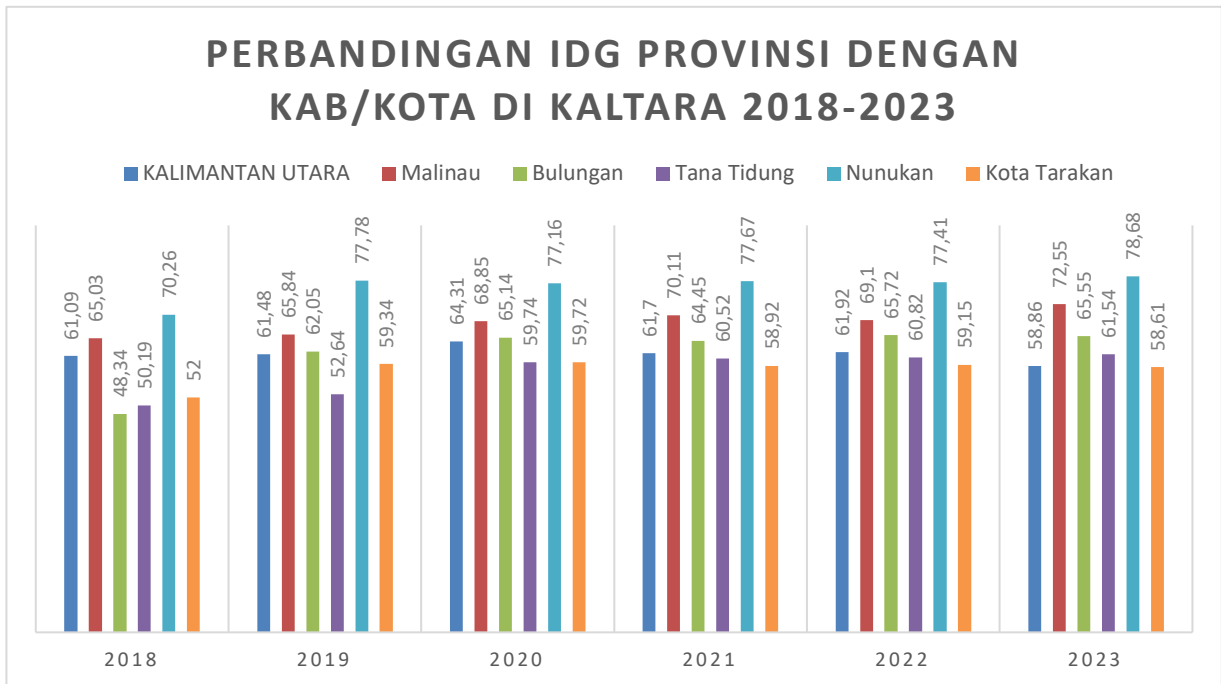
Tabel 3.13:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	IDG					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN UTARA	61,09	61,48	64,31	61,70	61,92	58,86
Malinau	65,03	65,84	68,85	70,11	69,10	72,55
Bulungan	48,34	62,05	65,14	64,45	65,72	65,55
Tana Tidung	50,19	52,64	59,74	60,52	60,82	61,54
Nunukan	70,26	77,78	77,16	77,67	77,41	78,68
Kota Tarakan	52,00	59,34	59,72	58,92	59,15	58,61

Sumber : BPS, 2024



Grafik 3.3:
PERBANDINGAN IDG PROVINSI DENGAN KAB/KOTA DI KALTARA 2018-2023



Sumber: BPS 2024

Tabel 3.14

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya
menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2023**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) 2023	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%) 2023	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) 2023	IDG 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	8,57	26,88	26,88	58,86
Malinau	20,00	28,98	28,98	72,55
Bulungan	20,00	22,10	22,10	65,55
Tana Tidung	15,00	24,22	24,22	61,54
Nunukan	32,00	27,25	27,25	78,68
Kota Tarakan	10,00	25,89	25,86	58,61

Sumber: BPS 2024



Tabel.3.15:
Analisa Efisiensi berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran untuk
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			Ket
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	
IKU2 : IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	60,33	58,61	97.15	250.000.000	250.000.000	100,00	Tidak Efisien

Tabel.3.16:
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Dukungan Personil dalam Pencapaian Sasaran	
				PNS	Non PNS
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Peberdayaan Gender (IDG)	100,47	3	0

Faktor penghambat itu antaranya, yaitu (1) Penurunan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kota Tarakan; (2) Sistem perpolitikan pada partai yang belum mendukung perempuan berkarir di politik (3) Efek negatif dari stigma perempuan berkarir di politik.

Faktor pendukung itu antaranya, yaitu (1) Kemudahan bagi perempuan mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan di Kota Tarakan. (2) Rendahnya angka putus sekolah bagi anak perempuan di Kota Tarakan (3) Banyaknya kegiatan pendampingan dan peningkatan kompetensi pada UMKM yang sebagian besar pelakunya adalah Perempuan



Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di berbagai sektor pembangunan

Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak

Indikator : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 1.000 Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi :
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.



- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO diperoleh dari jumlah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dikalikan 100.000. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja yang semakin baik.

Untuk menghitung nilai Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di tahun 2024, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan rumus :

$$= \left(\frac{\sum \text{kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\sum \text{perempuan diatas usia 18 tahun}} \right) \times 100.000$$

Jika dikonversikan dalam rumus adalah sebagai berikut:

$$\frac{20}{114.900} \times 100.000 = 17,41\%$$

Untuk Kota Tarakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 20 kasus dan jumlah penduduk perempuan diatas usia 18 tahun berdasarkan data BPS Kota Tarakan sebanyak 114.900 orang.



Tabel 3.17
Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun ke-empat (2024)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir RENTRA (2024)	Capaian kinerja s/d tahun 2024 thd RENTRA (%)
						Target	Realisasi			
<u>IKU3:</u> Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,04	0,07	39,99	9,23	17,95	17,41	103,10	17,95	103,10

Sumber : Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Tabel.3.18
Perbandingan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO menurut Nasional dan Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Kota Tarakan Tahun 2024	Keterangan
<u>IKU3:</u> Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	persentase	18,05	17,41	diatas capaian nasional karena indikator negatif

Sumber: Data BPS 2024

Tabel 3.19
Analisa Efisiensi berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran untuk
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			Ket
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	
<u>IKU3 :</u> Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	17,95	17,41	103,10	334.489.440	293.304.207	87,69	Efisien



Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Dukungan Personil dalam Pencapaian Sasaran	
				PNS	Non PNS
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	103,10	5	2

Berdasarkan tabel 3.17 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 103,10% dengan kategori **sangat tinggi** dimana capaian kinerja tahun 2024 merupakan tahun ke-empat dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Trend pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 meningkat 14% dari tahun sebelumnya secara Nasional.

Seperti tahun sebelumnya, wilayah tertinggi yang mencatat angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan (termasuk anak perempuan), adalah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. Peningkatan ini sejalan dengan intensitas upaya perbaikan akses keadilan yang telah dilakukan melalui Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), khususnya di Jawa Tengah.

Umumnya kasus KDRT di Kota Tarakan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi.



Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah. Hal ini bermula pada tugas suami yang semestinya bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi kebutuhan yang lainnya harus dipenuhi. Bahkan suami sering melimpahkan kebutuhan yang lainnya itu terhadap istrinya. Dengan keadaan demikian jadi si suami/istri stres, akhir dari semuanya itu suami/istri melakukan tindakan kekerasan rumah tangga. Kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga hal ini dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Narkoba.

Para pecandu alkohol atau narkoba enam hingga tujuh kali lebih berisiko untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena syaraf otak yang terganggu hingga emosi mereka tidak terkontrol. Selain risiko melakukan kekerasan terhadap pasangannya, para pecandu ini mengalami gangguan mental dan perilaku menyimpang.

3. Pernikahan anak.

Pernikahan di usia anak memberikan kontribusi pada kasus KDRT. Kala suami maupun istrinya usianya belum cukup untuk menjalani bahtera rumah tangga, karena emosinya masih labil akan berimbas pula pada ekonomi yang tidak stabil ditambah sulit menyatukan perbedaan maka terjadilah KDRT yang biasanya korbannya adalah wanita dan anak.

4. Pernikahan siri

Di Kota Tarakan ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru bisa memunculkan banyak sekali



permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan sebagai istri siri, termasuk jika terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istri siri, akibat hukumnya adalah istri siri itu tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Pendidikan

Laki-laki/perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa. Pada periode ini, seseorang akan dibebankan tugas-tugas awal perkembangan masa dewasa, diantaranya adalah pekerjaan, memilih teman hidup, belajar hidup bersama suami atau istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga. Laki-laki/perempuan dengan tingkat pendidikan rendah umumnya memiliki kematangan emosi yang rendah pula. Pernikahan muda sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Padahal, kematangan emosi ini akan semakin jelas kebutuhannya setelah menikah. Hidup berumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang. Laki-laki/perempuan dengan tingkat pendidikan rendah tidak mampu berkontribusi optimal, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Bagi perempuan, mereka memiliki lebih sedikit suara dalam pengambilan keputusan seperti keputusan menikah ataupun dalam kehidupan berumah tangga. perempuan



dengan tingkat pendidikan rendah kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi secara finansial bagi keluarga. Oleh karena itu, mereka akan cenderung memilih untuk menikah muda karena dianggap akan membantu meringankan ekonomi keluarga.

Gambar 3.1
Penyelesaian kasus dengan lintas sektor



Gambar 3.2
Pendampingan Korban Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak





Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka penurunan nilai Rasio KDRT adalah:

1. Kegiatan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2).
2. Pemberian penyuluhan/pembekalan pada pasangan calon pengantin di KUA bekerja sama dengan Departemen Agama, penanganan kasus dengan lintas sektor mulai Dinkes, PPPA Polres, RSUD dan pihak lain seperti Kelurahan dan Kecamatan.
3. Pembentukan Forum PUSPA dan PUSPAGA untuk mengatasi persoalan perempuan dan anak.

Dalam upaya peningkatan sasaran menurunnya tindak kekerasan pada perempuan dan anak dengan indikator rasio KDRT dengan masalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masih menganggap rumah tangga adalah area privat.
2. Kurangnya pengadministrasian mekanisme pencatatan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga-lembaga layanan.
3. Masyarakat masih belum memiliki keberanian untuk melapor terlebih lagi takut mendapat sikap kurang positif dari lingkungannya.
4. Masyarakat sudah turut serta tetapi masih belum sepenuhnya membantu aktivis dalam menyelesaikan kasus, ada beberapa korban sudah melapor tetapi mencabut laporannya agar tidak ditindaklanjuti. Karena mereka akan dikucilkan di lingkungan.



Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan : (Analisa keberhasilan program dan sub kegiatan

1. Sosialisasi tentang KDRT di lembaga pendidikan serta masyarakat.
2. Pelatihan kapasitas petugas dalam hal pelayanan dan manajemen pelaporan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak.
3. Aktif berperan serta dalam pemberian materi pada kursus perkawinan pada pasangan yang mau menikah bekerja sama dengan kementerian agama.
4. Sosialisasi tentang kasus kekerasan terhadap anak pada masyarakat
5. Pemberian perlindungan dan merahasiakan identitas pelapor.
6. Memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan lintas sector terkait serta meluangkan waktunya untuk terlibat penanganan pelaku maupun korban.
7. Pembentukan Forum PUSPA dengan harapan agar seluruh elemen masyarakat, utamanya lembaga masyarakat dapat bekerja dengan jangkauan yang lebih luas, memiliki jaringan bermitra yang lebih banyak untuk saling bertukar ide dalam konteks perempuan dan anak, membangun focus isu yang mereka bidangi berdasarkan strategi prioritas three ends, dan membangun sinergi nyata dengan sesama lembaga masyarakat terkait inovasi bagi perempuan dan anak.
8. Pembentukan PUSPAGA selain sebagai layanan pencegahan pada kasus anak, juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem layanan pemerintahan. Kegiatan yang



dilakukan antara lain penyuluhan di Kantor Urusan Agama (KUA)

bagi calon pengantin terkait pola asuh anak. Selain itu, penyuluhan terkait parenting pada masyarakat.

Gambar 3.3
Koordinasi Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak



Gambar 3.4
Penjangkauan kasus di Kelurahan Kr Anyar yang berkolaborasi dgn Kec Tarakan Barat, Kelurahan Kr. Anyar, Puskesmas Kr Rejo dan Peksos serta Ketua RT.





Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis ini didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi



indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

Faktor penghambat dari pencapaian indikator berupa masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, sehingga menyebabkan orang-orang yang mengalami kekerasan tersebut tidak berani melapor kepada lembaga-lembaga layanan pengaduan tersebut. Selain itu, belum meratanya edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dan cara pelaporannya.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di berbagai sektor pembangunan

Indikator : Rasio Kekerasan terhadap Anak

Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak

Indikator : Rasio Kekerasan terhadap Anak

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi:



penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan *child abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosi, kekerasan seksual, kekerasan sosial (penelantaran).

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak, akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya. Apalagi kekerasan seksual, akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO diperoleh dari jumlah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dikalikan 100.000. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja yang semakin baik.

Untuk menghitung nilai rasio kekerasan terhadap anak di tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{kasus kekerasan terhadap anak}}{\sum \text{anak dibawah usia 18 tahun}} \times 10.000$$

Jika dikonversikan dalam rumus adalah sebagai berikut:

$$\frac{21}{82031} \times 10.000 = 2,56\%$$



Untuk Kota Tarakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus dan jumlah penduduk anak dibawah usia 18 tahun berdasarkan data BPS Kota Tarakan sebanyak 82.031 orang.

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun ke-empat (2024)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian kinerja s/d tahun 2024 thd target RENSTRA (%)
						Target	Realisasi			
<u>IKU4:</u> Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,04	0,07	0,10	0,40	17,95	2,56	110	17,95	110

Sumber : Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Berdasarkan tabel 3.21 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 110% dengan kategori **sangat tinggi** dimana capaian kinerja tahun 2024 yang merupakan tahun ke-empat dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel.3.22
Perbandingan Rasio Kekerasan terhadap Anak menurut Nasional dan Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Kota Tarakan Tahun 2024	Keterangan
<u>IKU4 :</u> Rasio Kekerasan Terhadap Anak	persentase	32,50	2,56	dias capaian nasional



Tabel 3.23

Analisa Efisiensi berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran untuk
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan			Ket
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)	
<u>IKU4 :</u> Rasio Kekerasan terhadap Anak	17,95	2,56	110	699.350.917	594.970.650	85,07	Efisien

Tabel 3.24

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Dukungan Personil dalam Pencapaian Sasaran	
				PNS	Non PNS
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak	97,15	5	2

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator persentase anak korban KDRT yang tertangani, diantaranya adalah (1) Melaksanakan reintegrasi sosial sebagai tindak lanjut dari terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk kerjasama yang baik dengan lintas sektor; (2) Melaksanakan sosialisasi/edukasi sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tarakan di sekolah melibatkan tim dan forum anak dan pokja perlindungan anak; (3) Mekanisme pelaporan kasus kekerasan aksesibel. Sedangkan untuk penghambat dalam pelaksanaan indikator tersebut,



yaitu masih terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan Kota Tarakan dan kerentanan ketahanan keluarga.

Tujuan 2: Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Meningkatnya Akseptor KB

Indikator : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)

Pelayanan KB merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam tujuan SDGs ke-5, namun dalam satu dekade terakhir capaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) perempuan usia 15-19 tahun dan *unmet need* belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan antara lain dengan pendekatan pelayanan yang berkelanjutan “*continuum of care*” mulai dari hulu pada sampai hilir ; mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin nifas serta pasangan usia subur. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* : Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Dasar hukum Persentase cakupan peserta KB aktif adalah Permendagri No. 54 tahun 2010.

Untuk menghitung nilai Persentase cakupan peserta KB aktif di tahun 2019, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Aksesor KB aktif}}{\sum \text{modern}} \times 100$$

Jika dikonversikan dalam rumus adalah sebagai berikut:

$$\frac{28.491}{40.577} \times 100 = 70,25\%$$



Untuk Kota Tarakan jumlah peserta program KB aktif adalah 28.491 orang pada tahun 2024 dan jumlah pasangan usia subur sebanyak 40.557 orang berdasarkan data bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Data Aplikasi New SIGA Online BKKBN).

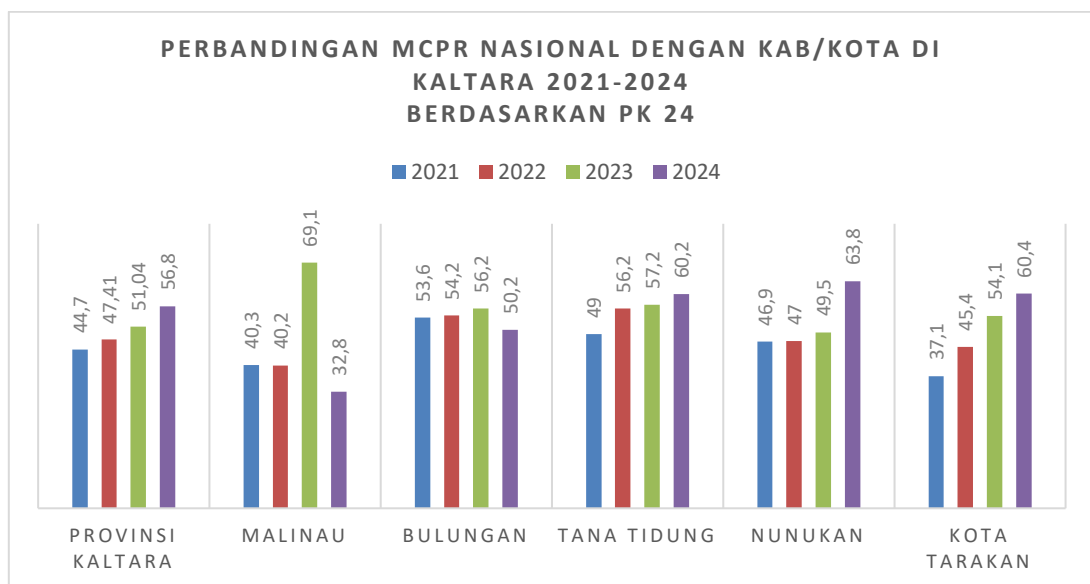
Tabel 3.25
Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun ke-empat (2024)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian kinerja s/d tahun 2024 thd target RENSTRA (%)
						Target	Realisasi			
IKU5 : Rasio Akseptor KB	%	62,13	37,1	45,4	66,65	64,15	70,25	106,15	64,15	106,15

Sumber: Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Berdasarkan tabel 3.25 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 106,15% dengan kategori **sangat tinggi**, dimana capaian kinerja tahun 2024 yang merupakan tahun ke-empat dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

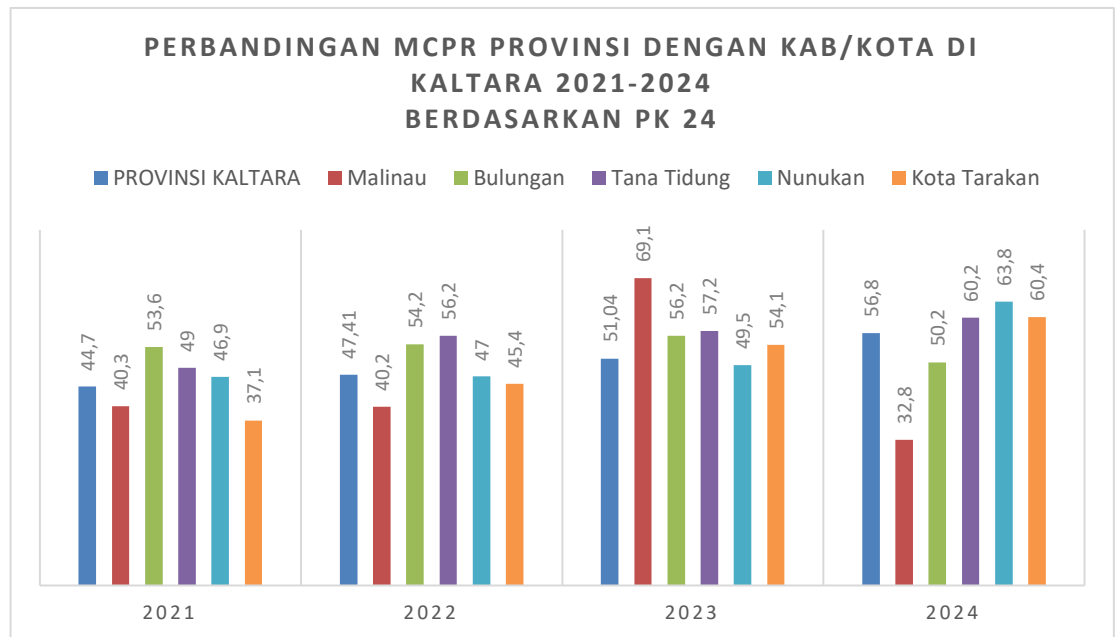
Grafik 3.4:
PERBANDINGAN mCPR NASIONAL DENGAN KAB/KOTA DI KALTARA 2021-2024
BERDASARKAN PK 24



Sumber: Data PK 24 BKKBN Prov Kaltim, 2024



Grafik 3.5:
PERBANDINGAN mCPR PROVINSI DENGAN KAB/KOTA DI KALTARA 2021-2024
BERDASARKAN PK 24



Sumber: Data PK 24 BKKBN Prov Kaltim, 2024

Tabel.3.26
Perbandingan mCPR menurut Nasional dan Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan PK 24

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Kota Tarakan Tahun 2024	Keterangan
IKU5: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	persentase	61,7	60,4	dibawah capaian nasional

Tabel 3.27
Analisa Efisiensi berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran untuk Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan Kota Tarakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		Ket	
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)		Capaian Anggaran (%)
IKU5: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	65,15	70,25	106,15	4.123.131.140	3.749.977.919	90,95	Efisien



Tabel 3.28
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Dukungan Personil dalam Pencapaian Sasaran	
				PNS	Non PNS
1.	Meningkatnya Akseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	106,15	25	0

Faktor penghambat tersebut di antaranya, yaitu (1) Peran dari Kampung KB dalam peningkatan keluarga berkualitas belum optimal; (2) Masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga layanan keluarga terkait kerahasiaan klien; (3) Terdapat beberapa lembaga layanan keluarga yang belum aktif karena belum dapat melaksanakan pelayanan; (4) Belum terintegrasinya antar lembaga layanan keluarga di tingkat wilayah; (5) Kualitas lembaga layanan keluarga yang ada di wilayah masih perlu ditingkatkan baik pada personil dan manajemennya; (6) Intervensi terhadap PUS baru belum optimal; (7) Adanya perubahan sumber data dari statistik rutin (SR) ke Pendataan Keluarga (PK), PK21 dikonversi ke new SIGA (masih dalam proses transisi); serta (8) Keterbatasan jumlah dan kualitas kader.

Faktor Pendorong dari pencapaian indikator sasaran program di antaranya, yaitu: (1) Kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana dan kepesertaan masyarakat untuk mengikuti Baksos KB cukup tinggi; (2) Adanya pelaksanaan program KB dan pendewasaan usia kawin (UU perkawinan); (3) Pelaksanaan baksos pelayanan KB; (4) Dukungan pendanaan DAK Non Fisik Bidang PPKB (BOKB) setiap tahunnya (5) Adanya anggaran dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur yang mengadakan kegiatan KB gratis bekerja sama dengan TNI.



Gambar 3.5
Pertemuan Musyawarah Kerja Tingkat Kelurahan di 4 Kampung KB



Gambar 3.6
Lokakarya Mini di 4 Kampung KB se-Kota Tarakan





Gambar 3.7
Pelayanan Pemasangan Implant pada Akseptor



Gambar 3.8
Baksos Pelayanan KB





1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
3. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) .
5. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



Dalam upaya peningkatan sasaran meningkatnya Pasangan Usia Subur peserta KB dengan indikator cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif. Dengan masalah :

1. Prevalensi unmet need KB yang masih dibawah capaian nasional. Pada tahun 2024 unmet need sebanyak 14,6 capaian nasional 11,1.
2. Keluhan komplikasi, efek samping, sehingga menyebabkan kegagalan ber-KB.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan :

1. Sosialisasi pada masyarakat tentang informasi penggunaan alat kontrasepsi sasaran utamanya pada bapak-bapak dan masyarakat luas. Hanya karena masa pandemi, kegiatan promosi KIE dilakukan dengan menggunakan media radio dan televisi. Penggunaan media radio dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan selama 3 kali. Sedangkan kegiatan melalui media televisi sebanyak 10 kali tayangan iklan.
2. Meningkatkan peran petugas kesehatan (bidan) dalam pelayanan KB. Kegiatan bansos KB di kampung KB dengan melibatkan bidan mampu mendekatkan pelayanan pada akseptor yang ingin ber-KB pada 4 kampung KB di 4 kecamatan di Kota Tarakan.
3. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat/perilaku baik secara langsung/tidak langsung ke arah yang lebih baik dengan mengikuti saran, gagasan/inovasi yang diajarkan, yang dilakukan selaras dengan faktor pendukung lain yaitu metode, media, materi, waktu dan tempat dilaksanakan pendidikan kesehatan. Baik melalui media iklan KIE di radio dan televisi juga pemberian penyuluhan langsung saat kegiatan Baksos Pelayanan KB.
4. Pemberian tunjangan pada Petugas Lapangan Keluarga Berencana selama 2 bulan. PLKB di Kota Tarakan merupakan adalah non Pegawai Sipil yang dilantik oleh pejabat berwenang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan KB, pelayanan kesehatan, serta evaluasi dan pengembangan KB. Dalam masa pandemi ada pola baru dalam pelayanan KB yakni pelayanan yang terus diberikan melalui para PLKB dengan mendatangi para akseptor yang menggunakan pil dan kondom.



5. Memaksimalkan peran 4 Kampung KB yang telah ada di setiap kecamatan di Kota Tarakan. Pelaksanaan kegiatan pertemuan kelompok kerja (12 kegiatan), kegiatan musyawarah (12 kegiatan) dan lokakarya mini (8 kegiatan) yang dilaksanakan di 4 Kampung KB diharapkan bisa membantu memberikan layanan konseling dan pendampingan pada warga di tiap Kampung KB sehingga memaksimalkan keberfungsian Kampung KB pada masa pandemic Covid-19.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.15 sebagai berikut:



Tabel 3.29
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	SS1: Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	IKU1: IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,30	92,73	100,47
		IKU2: IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	60,33	58,61	97,15
2.	SS2: Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	IKU3: Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 1.000 Perempuan	17,95	17,41	103,10
		IKU4: Rasio Kekerasan terhadap Anak	17,95	2,56	110
3.	SS3: Meningkatnya Akseptor KB	IKU5: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	65,15	70,25	106,15
4.	SS4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	IKU6: Nilai SAKIP	72,00	70,30	97,64
CAPAIAN KINERJA					102,41

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Tabel 3.30
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)	KET
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	100,47	314.943.890	293.304.207	93,13	Efisien
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	97,15				
2.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 1.000 Perempuan	103,10	982.739.107	839.010.957	85,37	Efisien
		Rasio Kekerasan terhadap Anak	110				
3.	Meningkatnya Akseptor KB	Persentase pemakaian	106,15	4,123,131,140	3,749,977,919	90,95	Efisien



		kontrasepsi modern (mCPR)					
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	97,64	3.958.759.083	3.793.455.952	95,82	Efisien
Total Capaian			102,41	9.379.573.220	8.694.762.528	92,70%	EFISIEN

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

a. Program Prioritas

NO	SASARAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2023		CAPAIAN (%)
		OUTCOME / OUTPUT	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i>	<i>13.842.640,00</i>	<i>13.053.800,00</i>	<i>94,30</i>
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPR	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Lembaga Penyediaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	13.842.640,00	13.053.800,00	94,30
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga perempuan yang mendapatkan bantuan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga				
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	<i>68.585.130,00</i>	<i>68.556.425,00</i>	<i>99,96</i>
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.585.130,00	68.556.425,00	99,96



	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus yang mendapat pelayanan</i>	<i>195.951.360,00</i>	<i>158.734.842,00</i>	<i>81,05</i>
	- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15.369.500,00	11.117.060,00	72,33
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.581.860,00	147.617.782,00	81,75
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga</i>	<i>Jumlah Lembaga penyedia</i>	<i>14.865.220,00</i>	<i>12.853.400,00</i>	<i>86,47</i>
	<i>Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>layanan perlindungan perempuan yang didampingi</i>	<i>18.851.860,00</i>	<i>16.749.040,00</i>	<i>88,85</i>
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	18.851.860,00	16.749.040,00	88,85
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak</i>	<i>9.999.980,00</i>	<i>9.988.000,00</i>	<i>99,91</i>
	- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	13.946.700,00	13.868.560,00	99,44
	- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.399.870,00	9.355.900,00	99,53
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	<i>12.362.920,00</i>	<i>11.509.690,00</i>	<i>93,10</i>
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.362.920,00	11.509.690,00	93,10
	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i>	<i>9.924.220,00</i>	<i>9.810.000,00</i>	<i>98,85</i>
	- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	9.939.800,00	9.924.000,00	99,84
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen responsif gender</i>	<i>5,451.960,00</i>	<i>4,605,750,00</i>	<i>84,48</i>
	- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5,451.960,00	4,605,750,00	84,48
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	<i>34.943.620,00</i>	<i>37.704.000,00</i>	<i>100</i>



	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	34.943.620,00	37.704.000,00	100
00	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.705.320,00	108.317.680,00	94,19
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	171.886.420,00	168.088.125,00	97,74
	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	148.415.000,00	98,84
	- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21.886.420,00	19.593.125,00	89,52
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	67.034.730,00	66.483.100,00	99,18
	- Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	67.034.730,00	66.483.100,00	99,18
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	277.652.727,00	191.208.707,00	68,87
	- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	22.635.197,00	22.057.900,00	97,45
	- Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	225.017.530,00	169.150.807,00	66,33
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	89.412.360,00	84.905.210,00	94,96
	- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	69.020.000,00	66.443.920,00	96,27
	- Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkekasus, anak mengalami bencana)	20.392.360,00	18.461.290,00	90,53
3	Meningkatnya Akseptor KB				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	435.027.440,00	394.901.486,00	90,78
	- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	187.228.800,00	186.329.180,00	99,52
	- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	13.839.954,00	13.838.112,00	99,99
	- Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	44.676.800,00	38.723.386,00	86,67
	- Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	67.595.000,00	60.801.396,00	89,95



	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				
	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>778.298.800,00</i>	<i>678.688.132,00</i>	<i>88,36</i>
	- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	162.820.000,00	81,41
	- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.800.000,00	2.600.000,00	92,86
	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	114.770.800,00	110.831.680,00	96,57
	- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	65.380.000,00	50.540.000,00	77,30
	- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	255.348.000,00	266.328.912,00	94,35
	- Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	134.567.540,00	99,36
	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>43.699.880,00</i>	<i>72,83</i>
	- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	60.000.000,00	43.699.880,00	72,83
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan KB</i>	<i>1.940.103.450,00</i>	<i>1.830.715.500,00</i>	<i>95,92</i>
	- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.700.000,00	29.678.050,00	99,93
	- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	476.830.850,00	387.911.850,00	81,35
	- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.409.672.600,00	1.395.565.600,00	99,00
	- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.900.000,00	17.560.000,00	73,47
	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB</i>	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK</i>	<i>46.750.000,00</i>	<i>38.500.000,00</i>	<i>82,35</i>
	- Integrasi Pembangunan Lintas di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi	3.750.000,00	3.720.000,00	99,20



	- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	43.000.000,00	34.780.000,00	80,88
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>185.851.450,00</i>	<i>155.000.149,00</i>	<i>83,40</i>
	- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	129.999.050,00	104.434.000,00	80,33
	- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.852.400,00	32.043.549,00	89,38
	- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10.000.000,00	8.522.600,00	85,23
	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	Jumlah kegiatan	<i>677.100.000,00</i>	<i>599.472.772,00</i>	<i>88,54</i>
	- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	261.000.000,00	233.828.000,00	89,59
	- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	416.100.000,00	365.644.272,00	87,87
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran Prioritas			3.750.396.352,00	3.330.007.448,00	88,79

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024



Dari Anggaran Prioritas, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas sebesar Rp. 5.420.814.137,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 4.901.306.576,00 sehingga serapan capaian menunjukkan angka 92,70%.

Hal tersebut dikarenakan adanya anggaran DAK Non Fisik dari PPPA yang tidak bisa diserap maksimal karena berdasarkan juknis tergantung pada besar kecilnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi. Selain itu adanya anggaran pada bidang BOKB yang tidak dapat diserap karena kendala teknis pada TA 2024.

Sementara selain anggaran prioritas, terdapat anggaran pendukung yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 3.32
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

b. Program Pendukung

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2024		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>3.716.214.978,00</i>	<i>3.602.828.383,00</i>	<i>96,95</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.657.288.978,00	3.555.933.883,00	97,23
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.926.000,00	46.894.500,00	79,58
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</i>	<i>79.386.900,00</i>	<i>72.072.845,00</i>	<i>90,79</i>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.996.060,00	17.958.385,00	71,84
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.979.840,00	4.703.460,00	94,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.411.000,00	49.411.000,00	100,00
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang diadakan</i>	<i>44.277.850,00</i>	<i>44.245.000,00</i>	<i>99,93</i>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44.277.850,00	44.245.000,00	99,93
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	<i>73.516.021,00</i>	<i>30.676.274,00</i>	<i>41,73</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan	71.516.021,00	28.676.274,00	40,10
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i>	<i>45.636.334,00</i>	<i>43.633.450,00</i>	<i>96,19</i>



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	2.709.000,00	1.918.300,00	70,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	32.784.334,00	32.095.150,00	97,90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.870.000,00	9.620.000,00	97,47
Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran Program Pendukung		3.958.759.083,00	3.793.455.952,00	95,82

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaannya bahwa besaran untuk anggaran prioritas dan pendukung adalah lebih besar anggaran prioritas, dan hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.33
Perbandingan anggaran

NO	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	5.420.814.137,00	4.901.306.576,00	90,42
2	Pendukung	3.958.759.083,00	3.793.455.952,00	95,82
		9.379.573.220,00	8.694.762.528,00	92,70

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024



- 2) Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2024, diisajikan dalam tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.34
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan DPPAPPKB

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2023	7.549.382.076,00	6.786.040.886,00	1.498.368.875,00	89,89
2	2024	9.379.573.220,00	8.694.762.528,00	682.201.762,00	92,70

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penggunaan sumber daya.

Tabel 3.35
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	DUKUNGAN PERSONIL DALAM PENCAPAIAN SASARAN	
				PNS	NON PNS
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	99.75	4	2
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	98.37		
2.	Meningkatnya kualitas perlindungan	Rasio kekerasan terhadap	1.766,34	4	



	perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	perempuan termasuk TPPO per 1.000 Perempuan			
		Rasio Kekerasan terhadap Anak	1.817,67		
3.	Meningkatnya Akseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	102,30	25	0
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	109,56	8	2
Total Capaian			77,66% (665,67)	24	19

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Dari tabel 3.21 dapat terlihat ketimpangan sumberdaya dalam hal jumlah dan kemampuan. Ketidakmerataan jumlah sumberdaya, kemampuan serta peralatan kerja antar bidang mengakibatkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak semua tercapai.

Hal yang bisa dilakukan adalah meminta penambahan sumberdaya utamanya manusia dan bila hal tersebut tidak terpenuhi solusi lainnya adalah memaksimalkan kerjasama antar bidang, pembagian tanggung jawab kerja yang jelas dan membagi habis beban pekerjaan.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penyediaan peralatan serta perlengkapan kerja yang memenuhi perlu juga dilakukan agar tidak terjadi penumpukan beban pekerjaan pada satu atau beberapa orang saja. Hal ini dapat diusulkan dalam anggaran rencana kerja setiap tahunnya.

E. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Sejak tahun 2022 hingga 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.





BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Keberhasilan yang dicapai berkat adanya kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari analisis ketiga sasaran, terdapat tiga indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, empat indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar > 100%, yaitu sasaran meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak; meningkatnya kualitas perlindungan anak dan keluarga; dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang



dapat menghambat peningkatan kinerja seperti seiring jumlah kekerasan yang cenderung meningkat, dan kepesertaan KB modern yang belum optimal.

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Optimalisasi KIE pada kegiatan di kampung KB
- b. Koordinasi dengan OPD dan instansi terkait
- c. Meningkatkan koordinasi lintas OPD / instansi vertikal untuk sinergitas yang lebih baik
- d. Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan seperti PATBM untuk meminimalisir terjadinya kekerasan anak
- e. Meningkatkan peran Puspaga dalam hal pencegahan melalui edukasi dan parenting maupun penjangkauan kepada anak/keluarga yang bermasalah.
- f. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah untuk konsultasi apabila sebuah keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan.
- g. Peningkatan peran PATBM dan mitra keluarga untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak.
- h. Penguatan melalui KIE ketahanan keluarga serta KIE melalui bina keluarga .



Tarakan, 06 Februari 2025
Kepala Dinas,



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001

Lampiran



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. Sudirman No 76 Gedung Gadis 1 Lantai 2 Telp. (0551) 2027698

E-mail : mailbox@kotatarakan.go.id

TARAKAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024 PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 (Xede(1) + Xede(2) + Inc-dis)$ dimana Xede(1) : Xede untuk harapan hidup Xede(2) : Xede untuk Pendidikan Inc-dis : Indeks distribusi pendapatan	Badan Pusat Statistik, Kemen PPPA	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = 1/3 (I(par) + I(DM) + Inc-dis)$ I(par) = Indeks keterwakilan di parlemen I(DM) = Indeks pengambilan keputusan Inc-dis : Indeks distribusi pendapatan	Badan Pusat Statistik, Kemen PPPA	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 1.000 perempuan	$\frac{\sum \text{Korban perempuan}}{\sum \text{Perempuan usia 18 tahun keatas}} \times 10.000$	Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio kekerasan terhadap anak	$\frac{\sum \text{Korban anak}}{\sum \text{Anak usia dibawah 18 tahun}} \times 1.000$	Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Meningkatnya aseptor Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	$\frac{\sum \text{Peserta KB aktive modern}}{\sum \text{Pasangan usia subur}} \times 100$	Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	APIP	Sekretariat
			1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)		
			2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)		
			3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)		
			4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)		
			5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)		
			Total		100%			

Tarakan, 6 Pebruari 2024
Mengetahui,

KERALA 4



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IVa
NIP. 19720822 2010011 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jend. Sudirman No 76 Gedung Gadis 1 Lantai 2 Telp. (0551) 2027698
E-mail : mailbox@kotatarakan.go.id
T A R A K A N

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

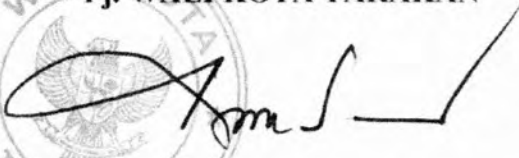
N a m a : **HASMAN PARIGI, S.E., M.M**
Jabatan : Kepala DP3APPKB Kota Tarakan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **Dr. BUSTAN, S.E., M. Si**
Jabatan : Pj. Wali Kota Tarakan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 1 Maret 2024

**Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA TARAKAN**

Dr. BUSTAN, S.E., M. Si

**Pihak Pertama,
KEPALA DP3APPKB,**

HASMAN PARIGI, S.E., M.M
NIP. 19720822 2010011 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. Sudirman No 76 Gedung Gadis 1 Lantai 2 Telp. (0551) 2027698

E-mail : mailbox@kotatarakan.go.id

T A R A K A N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KEPALA DINAS

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan meningkatnya kualitas keluarga	1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,30
		2.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	60,33
2	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dan perlindungan khusus terhadap anak	3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan	17,95
		4.	Rasio Kekerasan terhadap Anak	17,95
3	Meningkatnya Asektor KB	5.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66,15
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja daerah	6.	Nilai / Predikat SAKIP	72/ B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 263.842.640,00	APBD
2. Program Perlindungan Perempuan	Rp. 383.388.190,00	APBD dan DAK Non Fisik PPPA
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 45.649.290,00	APBD
4. Program Pengelolaan Sistem Data Anak dan Gender	Rp. 5.451.100,00	APBD
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 265.251.100,00	APBD dan DAK Non Fisik PPPA
6. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 434.099.817,00	APBD dan DAK Non Fisik PPPA
7. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 435.238.640,00	APBD dan DAK Non Fisik BOKB
8. Program Keluarga Berencana	Rp. 2.811.700.400,00	APBD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik BOKB
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 848.699.050,00	APBD dan Non Fisik BOKB
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.921.789.883,00	APBD
TOTAL DPA TA 2024	Rp. 9.315.110.970,00	

Tarakan, 1 Maret 2024

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA TARAKAN

Dr. BUSTAN, S.E., M. Si

Pihak Pertama,
KEPALA DP3APPKB,

HASMAN PARIGI, S.E., M.M
NIP. 19720822 2010011 001

TABEL. 6
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODEN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5.354.405.530,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.324.490.920,00							0,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4.785.284.200,00							0,00	

1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.736.946.616,00						-	0,00	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	3.567.039.978,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			324.00 Orang/bulan	3.502.713.978,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	64.326.000 ,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Refor masi birokr asi dan tata kelola peny elengg araan pemer intah daera h	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PEMBERDAYAA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Ad min istr asi Um um Per ang kat Da era h	-	-			-	50.897.280 ,00			-	Refor masi birokr asi dan tata kelola peny elengg araan pemer intah daera h	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN, PEMBERDAYAA N ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRASOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	4.979.880,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.00 Laporan	20.917.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	73.516.021,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.00 Laporan	2.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	71.516.021,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR G ET 20 24	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.493.337,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8.00 Unit	2.709.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	32.784.337,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	263.842.984,00						-	0,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	13.842.984,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30.00 Perangkat Daerah	13.842.984,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKAT OR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR GE T 20 24	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	-			-	250.000.000,00			Meningk atk an Sumber Daya Manusia Yang Berkuali tas Dan Berdaya Saing	Reform asi birokrasi dan tata kelola peny elengga raa n pemerin ta han daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberday aan Perempuan Kewenanga n Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampin gan				2 Lembaga	250.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningk atk an Sumber Daya Manusia Yang Berkuali tas Dan Berdaya Saing	Reform asi birokrasi dan tata kelola peny elengga raa n pemerin ta han daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	154.280.810,00						-	0,00	
	2.08.03.2.01	Pencegah an Kekerasan Terhadap Perempua n Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	-	-			-	20.042.120,00			-	Reform asi birokrasi dan tata kelola peny elengga raa n pemerin ta han daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				20.00 Dokumen	20.042.120,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					-	115.384.034,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				40.00 Orang	15.369.784,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota				20.00 Layanan	100.014.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			0				00	100.014.250,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.854.656,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				55.00 Orang	18.854.656,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	45.649.593,00						-	0,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	23.346.997,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		ota									han daerah				
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	13.946.997,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	9.400.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan	-	-			-	12.362.596,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
	2.08.04.2.02.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30.00 Orang	12.362.596,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.940.000,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota															

			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia				40.00 Layanan	9.940.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	5.452.200,00						-	0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.452.200,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	5.452.200,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	415.253.900,00						-	0,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	93.367.450,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				39 Organisasi	55.659.650,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Dokumen	37.707.800,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	321.886.450,00			-	Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.06.2.02.000 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	300.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02.000 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANS A OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN RENCANA TARJEN TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKAA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	21.886.45 0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	2.08.07	PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK	-	-			-	163.858.0 97,00						-	0,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.100.00 0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				4 Orang	14.100.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	129.365,437,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				20.00 Orang	22.635.197,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				8 Orang	106.730.240,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

												nta han daerah				
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.392.660,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota														

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang memeroleh Bantuan Kebutuhan Khusus				5 Orang	20.392.660,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						539.206.720,00							0,00	
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	390.258.720,00						-	0,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupa	-	-			-	390.258.720,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		n Daerah Kabupat en/Kota									akat						
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan															
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependuduka n				1.00 Dokumen	187.440.0 00,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Pening kata n kualita s pelaya nan keseha tan masyar akat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga															
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	169.940.0 00,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Pening kata n kualita s pelaya nan keseha tan masyar akat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga															
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpula n Data Keluarga				4900.00 Laporan	32.878.72 0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Pening kata n kualita s pelaya nan keseha tan masyar akat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAA N KELUARG A BERENCA NA (KB)	-	-			-	88.348.00 0,00						-		0,00	

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	58.348.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAS	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	35.448.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat				1 Laporan	5.400.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
2.14.03.2.01.001 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5.00 Dokumen	2.500.000 .00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Pening kata n kualitas pelayan an kesehat an masyar akat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.001 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				6.00 Dokumen	15.000.00 0.00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Pening kata n kualitas pelayan an kesehat an masyar akat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			0				0 0	15.000.00 0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Pening kata n kualitas pelayan an kesehat an masyar akat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengenda lian dan Pendistrib usian Kebutuha n Alat dan Obat Kontrasep si serta Pelaksan aan Pelayana n KB di Daerah Kabupate n/Kota	-	-				-	20.000.00 0,00			Mening katk an Sumbe r Daya Manusi a Yang Berkual itas Dan Berday a Saing	Pening kata n kualitas pelayan an kesehat an masyar akat	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															

N O	K O D E	URUSA N / BIDANG URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	INDIKA TOR PROG RAM / KEGIA TAN / SUB KEGIA TAN	TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG KA PENDAN AAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR G E T 2 0 2 4	PAGU INDIKA TIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Pengguna an Metode Kontrasep si Jangka Panjang (MKJP)				144.00 Orang	5.000.000 ,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	Mening katk an Sumbe r Daya Manusi a Yang Berkua litas Dan Berday a Saing	Pening kata n kualita s pelaya nan keseha tan masyar akat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjan g Pelayana n KB				24.00 Unit	10.000.00 0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG KESEHATA N DAN KB- REGUL ER- KB	Mening katk an Sumbe r Daya Manusi a Yang Berkua litas Dan Berday a Saing	Pening kata n kualita s pelaya nan keseha tan masyar akat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga				4.00 Kampung	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga				4.00 Kampung	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Berencana a)													
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	60.600.00 0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENDISTRASOPD	REALISASI CAPAIAN RENJASOPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK A PENDANA AN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TAR G E T 20 24	PAGU INDIKA TIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITA S			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksana an Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahte raan Keluarga	-	-			-	60.600.000,00			-	Pembe rday aan ekono mi mikro masyar akat	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PEMBERDAYA AN ANAK, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompo k Kegiatan Ketahana n dan Kesejaht eraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,				5.00 Laporan	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Pembe rday aan ekono mi mikro masyar akat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PEMBERDAYA AN ANAK, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)													
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			4 Unit	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100.00 Orang	21.600.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan			261 Orang	9.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODERE NSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDEK AN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga				31.00 Kelompok	10.000.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibantu													
	X	NON URUSAN						29.914.610,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						29.914.610,00							0,00	

		XX														
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	29.914.610,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	29.914.610,00			-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35.00 Unit	29.914.610,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

												h				
JUM LAH								5.354.405 .530,00							0,00	

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%		3.921.789.883							
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>2 layanan</i>	<i>Melaksanakan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	<i>3.696.214.978</i>						
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.637.288.978						
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.926.000						
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</i>	<i>3 layanan</i>	<i>Melaksanakan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>62.417.700</i>						
	50%	50%		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.060						
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.979.840						
25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 laporan	Melaksanakan pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.441.800						
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang diadakan</i>	<i>23 unit</i>	<i>Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>44.277.850</i>						
	100%			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	Melaksanakan pelayanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.277.850						
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	<i>2 layanan</i>	<i>Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>73.516.021</i>						
100%				Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Melaksanakan pelayanan Penyediaan jasa surat	2.000.000						
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	71.516.021						
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i>	<i>36 unit</i>	<i>Melaksanakan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>45.363.334</i>						
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.000						
25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Melaksanakan pelayanan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	32.784.334						
	100%			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Melaksanakan pelayanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.870.000						



Tarakan, 2 Januari 2024
Kepala Dinas

[Handwritten Signature]
Hasman Parigal, S.E. M.M.
Pembina / IVA
NIP. 19720822 2010011 001

SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN (PERGESERAN)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESEMBER

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
				FISIK (%)	KEU. (%)			
1	2	3		4	5	6	7	8
8	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	9.379.573.220,00	100,00	96,32	92,70	8.694.762.528,00	682.201.762,00	Hasman Parigi, S.E., M.M
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.958.759.083,00	100,00	99,86	95,82	3.793.455.952,00	165.270.281,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.716.214.978,00	100,00	99,85	96,95	3.602.828.383,00	113.386.595,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.657.288.978,00	100,00	100,00	97,23	3.555.933.883,00	101.355.095,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.926.000,00	100,00	90,61	79,58	46.894.500,00	12.031.500,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.386.900,00	100,00	100,00	90,79	72.072.845,00	7.314.055,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.060,00	100,00	100,00	71,84	17.958.385,00	7.037.675,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.979.840,00	100,00	100,00	94,45	4.703.460,00	276.380,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.411.000,00	100,00	100,00	100,00	49.411.000,00	0,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.277.850,00	100,00	100,00	99,93	44.245.000,00	32.850,00	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.277.850,00	100,00	100,00	99,93	44.245.000,00	32.850,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.516.021,00	100,00	100,00	41,73	30.676.274,00	42.839.747,00	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00	2.000.000,00	0,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.516.021,00	100,00	100,00	40,10	28.676.274,00	42.839.747,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.363.334,00	100,00	100,00	96,19	43.633.450,00	1.729.884,00	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.000,00	100,00	100,00	70,81	1.918.300,00	790.700,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.784.334,00	100,00	100,00	97,90	32.095.150,00	689.184,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.870.000,00	100,00	100,00	97,47	9.620.000,00	250.000,00	Johanes Calvin J.T, S. Sos
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.842.640,00	100,00	100,00	99,70	263.053.800,00	788.840,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	13.842.640,00	100,00	100,00	94,30	13.053.800,00	788.840,00	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	13.842.640,00	100,00	100,00	94,30	13.053.800,00	788.840,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	100,00	100,00	100,00	250.000.000,00	0,00	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	100,00	100,00	100,00	250.000.000,00	0,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	283.388.190,00	100,00	87,16	86,12	244.040.307,00	39.347.883,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.585.130,00	100,00	100,00	99,96	68.556.425,00	28.705,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.585.130,00	100,00	100,00	99,96	68.556.425,00	28.705,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	195.951.360,00	100,00	82,46	81,01	158.734.842,00	37.216.518,00	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.369.500,00	100,00	78,53	72,33	11.117.060,00	4.252.440,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	MENURUT DPA (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	KEU. (%)	PENYERAPAN DANA (Rp.)	(Rp.)	PA/PPTK
1	2	3		4	5	6	7	8
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.581.860,00	100,00	82,80	81,75	147.617.782,00	32.964.078,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.851.700,00	100,00	89,23	88,85	16.749.040,00	2.102.660,00	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.851.700,00	100,00	89,23	88,85	16.749.040,00	2.102.660,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	45.649.290,00	100,00	99,97	97,83	44.658.150,00	991.140,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	23.346.570,00	100,00	100,00	99,48	23.224.460,00	122.110,00	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13.946.700,00	100,00	100,00	99,44	13.868.560,00	78.140,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.399.870,00	100,00	100,00	99,53	9.355.900,00	43.970,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	12.362.920,00	100,00	100,00	93,10	11.509.690,00	853.230,00	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.362.920,00	100,00	100,00	93,10	11.509.690,00	853.230,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.939.800,00	100,00	99,84	99,84	9.924.000,00	15.800,00	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.939.800,00	100,00	99,84	99,84	9.924.000,00	15.800,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.451.960,00	100,00	100,00	84,48	4.605.750,00	846.210,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.451.960,00	100,00	100,00	84,48	4.605.750,00	846.210,00	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.451.960,00	100,00	100,00	84,48	4.605.750,00	846.210,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	265.251.100,00	100,00	99,81	95,15	252.373.633,00	12.877.467,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	93.364.680,00	100,00	99,45	90,36	84.365.508,00	8.999.172,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.659.360,00	100,00	99,08	83,83	46.661.508,00	8.997.852,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.705.320,00	100,00	100,00	100,00	37.704.000,00	1.320,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.886.420,00	100,00	100,00	97,74	168.008.125,00	3.878.295,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	100,00	100,00	98,94	148.415.000,00	1.585.000,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.886.420,00	100,00	100,00	89,52	19.593.125,00	2.293.295,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	434.099.817,00	100,00	82,74	78,92	342.597.017,00	88.926.720,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	67.034.730,00	100,00	99,70	99,18	66.483.100,00	551.630,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	67.034.730,00	100,00	99,70	99,18	66.483.100,00	551.630,00	Rinny Faulina, SKM. M.Kes

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	MENURUT DPA (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	KEU. (%)	PENYERAPAN DANA (Rp.)	PA/PPTK
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277.652.727,00	100,00	73,09	68,87	191.208.707,00	86.444.020,00
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.635.197,00	#N/A	100,00	97,45	22.057.900,00	577.297,00 Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	255.017.530,00	#N/A	70,70	66,33	169.150.807,00	85.866.723,00 Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.412.360,00	100,00	100,00	94,96	84.905.210,00	1.931.070,00
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	69.020.000,00	100,00	100,00	96,27	66.443.920,00	2.576.080,00 Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	20.392.360,00	100,00	100,00	90,53	18.461.290,00	1.931.070,00 Rinny Faulina, SKM. M.Kes
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	435.027.440,00	100,00	99,34	90,78	394.901.486,00	40.125.954,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	435.027.440,00	100,00	99,34	90,78	394.901.486,00	40.125.954,00
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	187.228.800,00	100,00	100,00	99,52	186.329.180,00	899.620,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	179.121.840,00	100,00	100,00	85,26	152.711.120,00	26.410.720,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	44.676.800,00	100,00	98,03	86,67	38.723.386,00	5.953.414,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.000.000,00	100,00	91,67	71,41	17.137.800,00	6.862.200,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.825.152.250,00	100,00	94,67	92,05	2.600.603.512,00	224.548.738,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	778.298.800,00	100,00	93,70	88,36	687.688.132,00	90.610.668,00
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	100,00	99,36	96,12	134.567.540,00	5.432.460,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	255.348.000,00	100,00	94,35	88,64	226.328.912,00	29.019.088,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	65.380.000,00	100,00	77,30	77,30	50.540.000,00	14.840.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.800.000,00	100,00	100,00	92,86	2.600.000,00	200.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	114.770.800,00	100,00	100,00	96,57	110.831.680,00	3.939.120,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	100,00	90,57	81,41	162.820.000,00	37.180.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	60.000.000,00	100,00	72,83	72,83	43.699.880,00	16.300.120,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	60.000.000,00	100,00	72,83	72,83	43.699.880,00	16.300.120,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	1.940.103.450,00	100,00	95,92	94,36	1.830.715.500,00	109.387.950,00
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.700.000,00	100,00	100,00	99,93	29.678.050,00	21.950,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	476.830.850,00	100,00	83,39	81,35	387.911.850,00	88.919.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.409.672.600,00	100,00	100,00	99,00	1.395.565.600,00	14.107.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.900.000,00	100,00	99,83	73,47	17.560.000,00	6.340.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	46.750.000,00	100,00	87,10	82,35	38.500.000,00	8.250.000,00
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (minggu depan)	3.750.000,00	100,00	99,20	99,20	3.720.000,00	30.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (poktan blm dilakukan bln depan selesai)	43.000.000,00	100,00	86,05	80,88	34.780.000,00	8.220.000,00 Dra. Sri Bangun Teki
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	862.951.450,00	100,00	91,43	87,43	754.472.921,00	108.478.529,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	MENURUT DPA (Rp.)	FISIK (%)	FISIK (%)	KEU. (%)	PENYERAPAN DANA (Rp.)	PA/PPTK
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	185.851.450,00	100,00	100,00	83,40	155.000.149,00	30.851.301,00
2.14.04.2.01.0017	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00	10.000.000,00	0,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	129.999.050,00	100,00	100,00	80,33	104.434.000,00	25.565.050,00
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	35.852.400,00	100,00	100,00	89,38	32.043.549,00	3.808.851,00
2.14.04.2.01.0028	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	10.000.000,00	100,00	100,00	85,23	8.522.600,00	1.477.400,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	677.100.000,00	100,00	89,07	88,54	599.472.772,00	77.627.228,00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	261.000.000,00	100,00	89,62	89,59	233.828.500,00	27.171.500,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	416.100.000,00	100,00	88,73	87,87	365.644.272,00	50.455.728,00

Tarakan, 30 Desember 2024
Kepala Dinas


Hasman Parigi, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I /IVb
NIP: 19720822 2010011 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121
Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id> Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Tarakan, 24 Februari 2025

Inspektur,


ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 72750242 199501 1 001

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa

**KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-